

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Atmadja, I Dewa Gede., & Budiarta, I Nyoman Putu. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Borahima, Anwar. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. Makassar: Unhas Press.
- Diantha, I Made Pasek. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadjon, Philipus M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Harsono, Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- HR, Ridwan. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Muchsan. (1982). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Panggabean, H. P. (2014). *Hukum Pembuktian: Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Patittingi, Farida. (2012). *Hukum Agraria: Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Indonesia*. Makassar: Unhas Press.
- Pide, Suriyaman Mustari. (2017). *Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenada Media.
- Prasojo, Eko. (2009). *Reformasi Birokrasi dan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Ruslan, Achmad. (2013). *Teori dan Konsiderans Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Focus Media.
- Santoso, Urip. (2019). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Sodik. (2013). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wahid, A. M. Yunus. (2014). *Pengantar Hukum Pertanahan*. Makassar: Pelita Pustaka.
- Waskito., & Arnowo, Hadi. (2019). *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2013). *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press.

### **Jurnal:**

- Amaliyah, et al. (2021). "Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah". *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Aris, Muhammad. (2024). "Tinjauan Yuridis Administrasi Pengamanan Aset Tetap Milik Pemerintah Daerah". *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 3(1).
- Astika, I.M. (2021). "Implementasi Data Mining Clustering dalam Pemetaan Sengketa Tanah". *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 5(2).
- Fattah, Abdul. (2023). "Problematisasi Sertifikasi Aset Daerah: Analisis Normatif Terhadap Kinerja Instansi Daerah". *Jurnal Legalitas*, 11(1).
- Kurniawati, Andi. (2021). "Hambatan Administrasi dalam Proses Pendaftaran Tanah Milik Pemerintah Kota Makassar". *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 29(2).
- Lestari, P. (2021). "Kepastian Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara bagi Instansi Pemerintah". *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(2).
- Muin, Fatwa. (2023). "Analisis Yuridis Pengamanan Aset Infrastruktur Jalan pada Pemerintah Kota Makassar". *Jurnal Poros Hukum*, 4(1).
- Pratama, R. (2020). "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Aset Daerah Melalui Tertib Administrasi". *Jurnal Hukum Publik*, 8(3).
- Ramli, Ahmad. (2022). "Analisis Fungsional Ter Heide dalam Penegakan Hukum Administrasi Pertanahan". *Jurnal Teori Hukum*, 14(2).
- Sari, Indah. (2022). "Urgensi Sertifikasi Tanah Pemerintah dalam Mewujudkan Tata Kelola Barang Milik Daerah". *Jurnal Manajemen Aset*, 6(1).
- Wicaksana, et al. (2021). "Sinergi Instansi Daerah dalam Percepatan Sertifikasi Aset Tanah Negara". *Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 10(4).

### **Skripsi:**

- Astika, Gusti Putu Dharma. (2021). *Percepatan Sertifikasi Melalui Klasterisasi Data Aset Pemerintah Kabupaten Bangli*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Hartanto, Singgih. (2022). *Tinjauan Yuridis Kedudukan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Berupa Tanah (Studi terhadap Tanah Masjid Al-Markaz dan Eks Pacuan Kuda di Kota Makassar)*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Kurniawati, Andi. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Tanah yang Menjadi Aset Pemerintah Kota Makassar*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

### **Website Resmi:**

- DetikSulsel. (2022). Pemkot Makassar Kalah Pertahankan Aset Lahan yang Diklaim Pengusaha. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6421177/pemkot-makassar->

[kalah-pertahankan-aset-lahan-yang-diklaim-pengusaha](#) diakses pada 9 Maret 2023.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.